

**Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar**

***Strategy for Empowering Micro, Small and Medium
Enterprises at the Makassar City Cooperatives and SMEs Office***

Andi Sadiyah Rahmayani, Andi Aslinda

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email : aslinda110@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar. Persoalan yang di hadapi pelaku usaha yaitu banyaknya program pemberdayaan yang dilaksanakan namun belum ada follow up yang dilakukan setelah pelatihan, kurangnya informasi terkait kegiatan pemberdayaan, dan program permodalan yang dilakukan tidak tersosialisasi secara merata. Secara akademis, hasil penelitian harus mengembangkan teoriteori yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana untuk pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan UMKM. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan kelima aspek yang dijadikan sebagai ukuran dalam menganalisis Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang dimana untuk indikator enabling (pemungkinan) hasilnya kurang baik, indikator empowering (penguatan) hasilnya kurang baik, indikator protecting (perlindungan) hasilnya kurang baik, indikator supporting (pendukungan) hasilnya sangat tidak baik dan indikator fostering (pembinaan) hasilnya kurang baik. Dari kelima indikator tersebut secara keseluruhan disimpulkan bahwa Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dinilai tidak berjalan secara optimal atau tidak berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang ditunjukkan tidak optimal atau tidak baik dikarenakan komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha sangat kurang serta beberapa kendala seperti permodalan dan masalah pengetahuan juga sangat mempengaruhi pemberdayaan berjalan tidak secara optimal.

Kata Kunci : Strategi; Pemberdayaan; UMKM

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the MSME Empowerment Strategy in Makassar City. The problems faced by business actors are that there are many empowerment programs implemented but no follow-up has been carried out after the training, the lack of information related to empowerment activities, and the capital programs carried out are not socialized evenly. Academically, research results must develop theories related to community empowerment. From the results of this study, it is hoped that it can contribute thoughts and discourses to the Makassar City government in empowering MSMEs. The type of research used is descriptive and uses a qualitative approach with data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the data analysis and discussion that have been described

show the five aspects that are used as a measure in analyzing the MSME Empowerment Strategy at the Makassar City Cooperatives and SMEs Service which for enabling indicators (possibility) the results are not good, empowering indicators (reinforcement) the results are not good, protecting indicators (protection) the results are not good, the indicators supporting the results are not very good and the indicators fostering the results are not good. From the five indicators as a whole, it is concluded that the MSME Empowerment Strategy at the Makassar City Cooperatives and SMEs Service is considered not running optimally or not running well. The results of the research that are shown are not optimal or not good because communication between the government and business actors is very lacking and several obstacles such as capital and knowledge problems also greatly affect empowerment to run not optimally.

Keywords: Strategy; Empowerment; SMEs

PENDAHULUAN

Perkembangan global yang begitu dahsyat membawa pengaruh dalam pranata sosial dan berimplikasi pada nilai-nilai yang bergeser karena adanya perubahan kebutuhan manusia, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terhadap pembangunan ekonomi nasional, dimana Indonesia menganut perekonomian terbuka dan menjalankan perekonomiannya dengan menciptakan interaksi dari pihak swasta maupun negara lain.

Pembangunan dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan tujuan dari Pancasila yang merupakan dasar negara, dimana pemerintah dituntut untuk berlaku adil terhadap tiap-tiap warga negara dengan cara menstabilkan atau meningkatkan kehidupan masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dari itu pemerintah mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dirumuskan untuk mengembangkan industri yang menjadi acuan besar pendapatan ekonomi negara. Salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan pendapatan besar bagi negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka dari itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan UMKM (Guntur et al., 2019).

Pemerintah telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk membangun usaha yakni, penerapan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam hal perekonomian yang lebih maju. Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimana Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998 silam telah memperkuat kedudukan potensi pengembangan UMKM. Dengan

adanya dasar hukum yang mengatur tentang usaha mikro mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan usaha melalui program pemberdayaan usaha mikro, seperti di negara-negara lain usaha mikro yang biasa disebut sebagai bisnis keluarga memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah setempat dan diberi kemudahan untuk memperoleh akses yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar memiliki banyak daya tarik dalam berbagai sektor ekonomi yang mampu meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga diperlukan strategi pemberdayaan UMKMyang mampu menumbuhkan tingkat persaingan UMKM di Kota Makassar yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 17 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, peraturan daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada koperasi dan usaha kecil yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing serta

Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

Tabel 1. Jumlah UMKM Kota Makassar

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	TALLO	45
2.	WAJO	25
3.	TAMALATE	157
4.	MARISO	517
5.	MAMAJANG	81
6.	TAMALANREA	25
7.	BONTOALA	381
8.	PANAKUKKANG	176
9.	UJUNG PANDANG	354
10	MAKASSAR	149
11	MANGGALA	312
12	UJUNG TANAH	8
13	RAPPOCINI	385
14	BIRINGKANAYA	63
15	SANGKARRANG	5
JUMLAH		2683

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (2018)

Pada data yang disajikan dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Kota Makassar memiliki 2683 UMKM yang tersebar di

berbagai kecamatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Makassar tahun 2019 menempati posisi pertama tingkat kemiskinan terendah dari 24 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah Kota Makassar dalam

memaksimalkan kualitas koperasi untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat. Hanya saja untuk mengetahui perkembangan koperasi secara umum di Kota Makassar sulit diakses karena kurangnya laporan keuangan atau perkembangan dari koperasikoperasi terkait. Pada tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencatat sekitar 16.492 pelaku UMKM dan pada tahun 2020 berjumlah sekitar 172.643 pelaku

UMKM yang berada di Kota Makassar. Pemerintah Kota

Makassar telah melakukan beberapa program berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan UMKM yang diadakan pada tahun 2019, yaitu: 1) bimtek pola pengelolaan limbah rumah tangga untuk UMK, 2) bimtek teknik pengelolaan warung makan, 3) fasilitasi pemasaran produk UMKM dengan pelaku bisnis, 4) pengembangan pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha jasa Laundry, 5) pemanfaatan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas

UKM, 6) peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM, 7) lomba lorong UKM, 8) sentra Galeri produk unggulan koperasi dan UKM, 9) penyelenggaraan promosi produk unggulan, dan 10) workshop peningkatan pengelolaan keuangan

UMKM.

Berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Makassar dari beberapa program pemerintah yang telah dilaksanakan yaitu lantaran terbentuk pengelolaan manajemen pemberdayaan dimana banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan namun tidak ada *follow up* yang dilakukan setelah

pelatihan, informasi terkait program dari pemerintah baik yang sudah maupun akan dilaksanakan sulit di akses, dan program permodalan yang dilakukan tidak tersosialisasi dengan baik dan merata terhadap semua pelaku usaha.

Asumsi peneliti terhadap Strategi Pemberdayaan UMKM di

Kota Makassar terhadap Pemberdayaan UMKM didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu Nurmayanti (2018) tentang

Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di

Kelurahan Salotellue Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif yang dimana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM dibuat dalam beberapa kerja sama yang terencana. Hambatan yang dihadapi dalam hal sumber daya manusia yaitu pelaku UMKM banyak yang masih memiliki pendidikan rendah sehingga sulit untuk mengatur atau pun memanajemen pengelolaan usaha yang dibangun dan pembiayaan atau modal para pelaku UMKM terkadang sulit merintis usaha disebabkan kurangnya modal atau membutuhkan modal yang cukup besar, sementara mereka para pelaku UMKM tidak memiliki modal cadangan saat bahan pokok yang digunakan harganya di pasaran tiba-tiba naik dan menyebabkan usaha yang dirintis mulai menurun.

Aina, Jumiati, dan Adil (2018) penelitian tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Padang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif yang dimana kesimpulan dari penelitian tersebut. Pertama dalam pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM belum terlaksana secaramaksimal. Karena dari segi sumber daya manusia masih kurangnya tenaga profesional untuk membantu pelaku usaha dalam pembinaan. Tenaga pendamping yang dikerahkan hanya melakukan pendataan dan membantu dalam penyuluhanseminar. Kedua, berkaitan dengan kendala dibagi menjadi dua, kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kurangnya tingkat produksi dan tidak adanya galeri untuk mempromosikan produk hasil usaha dari UMKM. Kendala eksternal diantaranya masih kurangnya minat dan kesadaran dari pelaku usaha bahwa perlunya mengikuti pembinaan, kendala lainnya adalah kurangnya tenaga profesional yang dimiliki oleh Dinas. Ketiga, berkaitan dengan solusi adalah dengan menyediakan sarana untuk promosi bagi UMKM dalam bentuk pameran dan bazar, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mendapatkan pembinaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian, informan penelitian, dan teknik analisis data. Berdasarkan realitas dan penjelasan tersebut merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh tentang strategi pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Makassar untuk meningkatkan

taraf ekonomi masyarakat dengan mengangkat judul penelitian **Strategi**

Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini tepat digunakan karena bersifat dalam bentuk survey atau terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data-data fakta mengenai UMKM. Survey sangat diperlukan untuk menentukan masalah yang belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi untuk memahami interaksi sosial antara pelaku usaha UMKM dengan Pemerintah, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan UMKM.

HASIL PENELITIAN

Usaha Mikro, Keci, dan Menengah merupakan sektor usaha yang terbukti telah memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi untuk mendorong perekonomian negara secara regional dan nasional. Sektor usaha juga menjadi unggul dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah. Secara khusus, Kota Makassar yang merupakan pusat perekonomian di Sulawesi Selatan memiliki peluang yang sangat banyak dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu langkah meningkatkan PAD

(Pendapatan Asli Daerah) Kota Makassar.

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memberdayakan dan mengembangkan UMKM. Pembahasan dari hasil penelitian ini merupakan interpretasi atau penggambaran hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan konsep para ahli sehingga dapat mengembangkan teori yang menghubungkan temuan hasil penelitian dan mendeskripsikan hasil data penelitian dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Hasil penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data yang paling utama guna memperoleh data dan mengungkap strategi pemberdayaan UMKM yang disajikan berdasarkan definisi konsep penelitian, yaitu : *enabling* (pemungkinan), *empowering* (penguatan), *protecting* (perlindungan), *supporting* (pendukungan), dan *fostering* (pemeliharaan). Untuk mengetahui strategi pemberdayaan UMKM dapat dilihat melalui tanggapan-tanggapan informan yang dianggap representatif dan observasi yang didapat di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam pembahasan secara terperinci setiap hasil indikator yang berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut:

1. Enabling (pemungkinan)

Enabling atau pemungkinan menurut Soeharto (2014) adalah menciptakan suasana

atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.

Hasil penelitian terkait dengan kemungkinan tingkat perkembangan UMKM di Kota Makassar dengan melihat apa saja Strategi Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diukur menggunakan indikator *enabling* (pemungkinan) maka dapat disimpulkan kurang optimal, berdasarkan dari kategori tersebut disimpulkan bahwa program pelatihan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar sudah terlaksana dengan cukup baik karena sebagian besar masyarakat sudah mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, beberapa pelaku usaha sudah mengikuti kegiatan pemberdayaan akan tetapi belum ada perubahan yang dirasakan oleh pelaku usaha setelah kegiatan dilaksanakan. sehingga tergolong kurang optimal. Disebabkan dengan adanya pernyataan pelaku usaha yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk merasakan perubahan yang lebih baik, dan yang menjadi kelemahan pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kota Makassar dikarenakan dalam melaksanakan pemberdayaan pemerintah tidak menggolongkan materi yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha dan juga tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah sehingga pemberdayaan yang dilakukan

pemerintah dapat dikatakan kurang adil dan merata dan sanak kemungkinan berhasilnya program pemberdayaan tersebut dengan tujuan mengembangkan UMKM di Kota Makassar.

2. Empowering (penguatan)

Empowering atau penguatan menurut Soeharto (2014) adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

Hasil penelitian terkait dengan strategi tingkat perkembangan UMKM di Kota Makassar dengan melihat apa saja penguat dari strategi pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diukur menggunakan indikator *empowering* (penguatan) maka dapat disimpulkan kurang optimal, yang berdasarkan dari kategori tersebut dapat dianalisis bahwa dalam melaksanakan program pelatihan pemberdayaan pemerintah belum mampu mengondisikan tingkat pengetahuan tiap masyarakat pelaku usaha yang berbeda-beda dan belum ada sama sekali tindak lanjut yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha setelah mengikuti program pemberdayaan sehingga tujuan dari untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha kemungkinannya sangat kecil.

3. Protecting (perlindungan)

Protecting menurut Soeharto (2014) yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak

tertindas oleh kelompokkelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.

Hasil penelitian terkait dengan strategi perkembangan UMKM di Kota Makassar dengan melihat apa saja perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diukur menggunakan indikator *protecting* (perlindungan) maka dapat disimpulkan kurang optimal, disebabkan dalam melaksanakan program pelatihan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar belum mampu membangun komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan belum memberikan tindak lanjut setelah melaksanakan program pemberdayaaan UMKM, serta ada UMKM yang lebih berkembang pesat dan ada juga yang kurang berkembang, artinya pemerintah belum memberikan perlindungan yang maksimal dan merata ke semua UMKM di Kota Makassar.

4. Supporting (pendukungan)

Supporting menurut Soeharto (2014) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Hasil penelitian terkait dengan strategi perkembangan UMKM di Kota Makassar dengan melihat apakah faktor pendukung perkembangan UMKM di Kota Makassar dalam hal pemberian materi (ilmu) maupun finansial (modal) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diukur menggunakan indikator supporting (pendukungan) maka dapat disimpulkan sangat tidak optimal, disebabkan dalam melaksanakan program pelatihan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar belum mampu menyampaikan materi dan memberikan tanggapan yang baik kepada beberapa pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pemberdayaan. Dan juga berdasarkan hasil temuan peneliti dari beberapa sumber pemerintah tidak memberikan sosialisasi secara continue. Masyarakat atau pelaku usaha kecil jarang dilibatkan dalam pameran internasional dan nasional hanya pelaku usaha yang besar atau yang sudah cukup terkenal yang diikuti dalam pameran UMKM yang cukup bergengsi.

Bantuan Permodalan bagi UMKM pun tidak langsung diberikan oleh pemerintah namun menggunakan perantara kerja sama dalam hal ini Bank yang berkaitan dan pencairan dana pun belum ada hingga saat ini dan persyaratan yang diberikan oleh bank terkait juga sangat susah karena harus disertai dengan jaminan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku usaha, sedangkan pada umumnya pelaku usaha menengah kebawah memiliki lahan kehidupan yang kecil.

Adapun data jumlah pelaku usaha yang di berdayakan oleh pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019-2020, sebagai berikut dalam table 3.

Table 3. Data Pelaku Usaha di Kota Makassar tahun 2019-2020

NO	Uraian	2019	2020
1	Usaha Mikro	7.450	4.647
2	Usaha Kecil	5.259	5.311
3	Usaha Menengah	3.319	3.319
	Jumlah	16.028	13.277

Sumber : data di olah 2021 5.

Fostering (pembinaan)

Fostering atau pembinaan menurut Soeharto (2014) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan.

Hasil penelitian terkait dengan strategi perkembangan UMKM di Kota Makassar dengan melihat apakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah berjalan secara optimal dan merata yang diukur menggunakan indikator fostering (pembinaan) maka dapat disimpulkan kurang optimal, hal ini disebabkan dalam masih ada pelaku usaha yang merasa pemerintah belum memberikan tindak lanjut dari hasil pemberdayaan serta materi yang diberikan kurang berkaitan dengan jenis usaha pelaku usaha sehingga pemerintah dikatakan kurang mampu memelihara kondisi kondusif dengan pelaku usaha dan juga pelaku usaha tidak dapat berkembang secara optimal dan akan kurang memahami

bagaimana cara untuk bisa meningkatkan jumlah pemasaran produknya.

Tabel 4. Hasil Penelitian

N O	Indikator	SO	O	CO	TO	STO
1	<i>Enabling</i> (Pemungkinan)					
2	<i>Empowering</i> (Penguatan)					
3	<i>Protecting</i> (Perlindungan)					
4	<i>Supporting</i> (Pendukungan)					
5	<i>Fotering</i> (Pembinaan)					

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan kelima aspek yang dijadikan sebagai ukuran dalam menganalisis Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang dimana :

1. Indikator enabling (pemungkinan) hasilnya kurang optimal, beberapa pelaku usaha sudah mengikuti kegiatan pemberdayaan akan tetapi belum ada perubahan yang dirasakan oleh pelaku usaha setelah kegiatan dilaksanakan.
2. Indikator empowering (penguatan) hasilnya kurang optimal
3. Indikator protecting (perlindungan) hasilnya kurang optimal
4. Indikator supporting (pendukungan) hasilnya sangat tidak optimal
5. Indikator fostering (pembinaan) hasilnya kurang optimal

Dari kelima indikator tersebut secara keseluruhan disimpulkan bahwa Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota

Makassar dinilai tidak berjalan secara optimal atau tidak berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang ditunjukkan tidak optimal atau tidak baik dikarenakan komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha sangat kurang serta beberapa kendala seperti permodalan dan masalah pengetahuan juga sangat mempengaruhi pemberdayaan berjalan secara tidak optimal.

9. Implikasi

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini yaitu adanya masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Makassar terutama mengenai persoalan kegiatan pelatihan yang dimana pihak pelaksana kegiatan tidak bisa memberikan umpan yang baik dan kurangnya informasi yang terbuka mengenai kegiatan pemberdayaan UMKM serta masalah permodalan yang tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini. Dengan hasil penelitian ini juga akan berimplikasi pada peningkatan mutu strategi pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan dengan hasil penelitian ini juga menjadi salah satu bentuk evaluasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar itu sendiri untuk dapat memperbaiki yang menjadi kekurangan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Makassar yang sedang berlangsung saat ini.

Saran

Adapun berbagai saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya penggolongan kelompok program pelatihan pemberdayaan pelaku usaha yang jenis usahanya hampir serupa sehingga materi yang diberikan berkenaan dengan jenis usaha pelaku usaha.
2. Diperlukan adanya komunikasi yang baik antar pemerintah dan pelaku usaha agar pemberdayaan dapat berjalan secara optimal, sehingga wawasan atau ilmu pengetahuan masyarakat pelaku usaha juga dapat terbuka dan pemerintah juga harus memberikan tindak lanjut setelah melaksanakan pemberdayaan sebagai bentuk bantuannya kepada pelaku usaha.
3. Perlu adanya komunikasi yang baik antar pemerintah dengan pelaku usaha sehingga tidak ada lagi UMKM yang merasa tertindas.
4. Perlu adanya kepastian mengenai permodalan yang diajukan di bank terkait, sehingga masyarakat pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan permodalan tidak lagi menunggu sampai berbulan atau bertahun lamanya. Dandiharapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mampu membuka lagi bantuan permodalan bagi UMKM di Kota Makassar.
5. Diharapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar lebih bisa merangkul secara keseluruhan UMKM di Kota Makassar sehingga tidak ada lagi UMKM yang merasa tidak diperdulikan dan merasa terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Pers.
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management*. Buku 1, Edisi 12 Jakarta
- David, R. F. (2016). *Managemen Strategik*. Buku I, 12–30.
- Guntur, M., Aslinda, Nur A. Cudai, & Zainal, H. (2019). *The Model of Policy for Small Business Empowerment Programs in Wajo Regency*. Indonesia.335 (ICESSHum), 963–972.
- Guntur, M. Aslinda. & Sakawati H. 2017. *Model Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Wajo*. Hal.29
- Hamid, I. H. (2016). *Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. In J+Plus Unesa (Vol. 5, Issue 1).
- Pearce, A. John, Robinson Jr. 2009. *Strategic Management*. Jakarta. Penerbit Selemba Empat. Penerjemah
- Kwan Men You. Edisi 10. Hlm 5
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*.

Penerbit PT. Pustaka Utama.
Jakarta.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat;*

Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Edisi 4.

UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. UU No. 20 Tahun 2008, 1, 1–31.

Jurnal Aktor

Vol. 1, No. 1, Oktober 2021

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167